



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO PEREKONOMIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS PRASUTIO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **222897**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/73 m2 di KOTA SALATIGA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/76 m2 di SEMARANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 252.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL  
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp.  
35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
160.000.000
4. MOTOR, HONDA NON MATIC Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000
5. LAINNYA, 3SIXTY SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI  
Rp. 13.000.000
6. LAINNYA, WIMCYCLE SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL  
SENDIRI Rp. 3.000.000
7. LAINNYA, MV SEPEDA MINIVELO Tahun 2020, HASIL SENDIRI  
Rp. 5.000.000



8. MOTOR, HONDA WIN MCB Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.  
5.000.000
9. MOTOR, KAWASAKI BINTER MERZY Tahun 1982, HASIL  
SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.225.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 529.851.075

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.856.076.075

III. HUTANG Rp. 549.921.293

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.306.154.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.